

CATATAN KEGIATAN

LOKAKARYA PENUTUPAN PROYEK GOVERNANCE 2011-2013

04 Desember 2013 – Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas







Daftar Isi

Pendahuluan	2
Sesi I : Pidato	3
Sesi II : Presentasi dan Umpan Balik dari Peserta	5
Sesi III : Diskusi Kelompok	12
Sesi IV : Penyerahan Penghargaan	17
Sesi V : Penutupan	19

Pendahuluan

Pada tanggal 4 Desember 2013, Proyek Governance resmi ditutup melalui sebuah kegiatan lokakarya yang diselenggarakan di Aula Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WIB dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, 11 orang perempuan dan 49 orang laki-laki termasuk panitia.

Peserta berasal dari unsur SKPD, 6 desa uji coba dan 1 kecamatan. Hadir pula perwakilan dari PT. KSK dan Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) bertindak sebagai fasilitator dan bersama-sama dengan Bappeda.

Sebelum acara dimulai, para peserta membaca dengan teliti serangkaian panel display, yang mencerminkan aspek yang berbeda dari program selama dua tahun. Dua panel 'Infographic' menceritakan sejarah proyek yang menyoroti saat-saat penting dan tonggak pencapaian sejak 2011-2013. Empat panel display diilustrasikan sebagai aspek elemen utama dalam proyek pemerintahan – Penguatan Kapasitas, Advokasi Kebijakan, Pembelajaran Bersama, dan Interaksi Dinamis yang Efektif. Sebelum acara selesai, para peserta mengisi kuesioner untuk menilai peningkatan kapasitas dalam proyek.

Bapak Dino Mikha dari YTS adalah pembawa acara, dan Ibu Dian Anggraeni dari YTS adalah fasilitator utama. Pertemuan tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya, yang dipimpin oleh Ibu Pitra Asi, dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Ramiasi.



Peserta melihat infografik



Peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya



Salah satu peserta memimpin doa

Sesi I : Pidato

Sambutan dan laporan ketua panitia, Bapak Margori Limin, SE (Ketua Bappeda)

Pertama, ia berbicara tentang latar belakang kerja sama dengan YTS, bagaimana pemerintah Gunung Mas sangat menghargai apa yang YTS telah lakukan selama lebih dari 10 tahun untuk memberdayakan desa-desa melalui program mata pencaharian, mendukung perencanaan partisipatif, penguatan lembaga perekonomian desa, dan penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten. Pemerintah telah mengakui YTS sebagai salah satu kontributor utama pembangunan di Gunung Mas.

Kedua, ia menjabarkan tujuan khusus lokakarya:

1. Untuk memberikan umpan balik laporan akhir Proyek Governance;
2. Untuk membahas aspek-aspek penting dari proyek ini, dan
3. Bagaimana proyek ini membangun dasar yang baik agar bisa dilanjutkan oleh SKPD dan desa.



Selain itu, workshop ini akan memberikan ruang bagi semua pihak yang berkepentingan untuk membahas langkah-langkah yang diinginkan untuk rencana masa depan, baik dengan dukungan YTS atau tidak.

Sambutan dan pembukaan dari Bupati Kabupaten Gunung Mas yang diwakili oleh ASDA II



Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sangat berterima kasih atas kiprah yang dilakukan oleh YTS selama ini baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten.

ASDA II menekankan tiga prinsip good governance yang selama ini dipromosikan YTS yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Tiga prinsip tersebut merupakan kunci untuk mengembangkan praktek dari prinsip-prinsip good governance lainnya. Saat ini aparatur pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan masyarakatnya masih harus diajak dan dipacu untuk memastikan ketiga prinsip tersebut dijalankan pada setiap tingkatan dan mencapai tingkatan yang lebih luas serta terlibat dengan efektif.

Partisipasi tidak hanya akan membangun rasa kepemilikan di masyarakat, namun secara alami akan mendorong pemerintah untuk transparan dan akuntabel. Kualitas partisipasi masyarakat harus berubah dari hanya sekedar menghadiri pertemuan hingga sampai mempengaruhi pengambilan keputusan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diatas, dibutuhkan kemauan politik dari para pemegang kekuasaan untuk melihat prinsip tersebut dijalankan. Hal ini justru akan membantu kredibilitas pemerintah, dan akan memastikan kekuasaan mereka tetap kuat. Misalnya, Kebijakan Pagu Indikatif Kecamatan pada tahun 2012 lalu bukanlah ajang Kepala Bappeda merebut perhatian rakyat dan ingin menjadi pahlawan sehingga bisa berakibat menjatuhkan reputasi Bupati. Sesungguhnya kebijakan itu ketika telah ditandatangani oleh Bupati adalah bagian dari kebijakannya dan Bappeda serta SKPD lain akan menjadi motor penggerak kebijakan itu.

Sesi II: Presentasi & Umpan Balik dari Peserta

Presentasi Governance Project Overview

A. Presentasi Perwakilan Desa Uji Coba

Presenter: Elsita Lisnawati (Ketua BPD Tumbang Tajungan)

Enam (6) desa uji coba dipilih mewakili karakteristik dari 21 desa dampingan YTS yang tersebar di 3 kecamatan.

YTS memberikan dukungan penguatan tata kelola desa dikarenakan adanya tantangan geografis yang menyulitkan interaksi dan komunikasi desa terpencil dengan pemerintah kabupaten; sulitnya mendapatkan proyek melalui musrenbang; dan kurangnya kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain, desa-desa dampingan YTS memiliki aset kelembagaan desa seperti KKD (Kelompok Kerja Desa) dan KPP (Kelompok Peminat Program). Selain itu, ada komitmen dari 6 desa ujicoba untuk membangun perubahan menuju tata kelola desa yang lebih baik.

Proyek ini menjadi agenda YTS untuk mendekatkan komunikasi antara desa dan pemerintah kabupaten. Hasil-hasil dari dukungan proyek ini adalah: 1) Meningkatnya kapasitasnya pemerintah desa dan fasilitator lokal dalam memfasilitasi musrenbang dan menyusun RPJMDesa yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan; 3) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran. 4) Selain itu desa-desa uji coba juga mendapatkan realisasi usulan melalui musrenbang sebanyak 10 usulan dari 30 usulan.

Kami menemukan fakta bahwa: 1) Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan pemerintah desa bekerja lebih baik; 2) Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) mempermudah proses musrenbang untuk menyusun daftar prioritas usulan; 3) Pembatalan PIK merupakan kemunduran dari proses pengambilan keputusan dalam musrenbang karena tidak ada lagi panduan yang jelas untuk membuat prioritas.

Pembelajaran yang didapat: Perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas ternyata sama pentingnya dengan bantuan yang bersifat fisik/material; Kami memahami bahwa partisipasi aktif akan mendorong pemerintah untuk bekerja secara akuntabel atau bertanggung-gugat.

Di akhir presentasi, perwakilan desa uji coba menampilkan mimpi mereka untuk Kabupaten Gumas yang lebih baik dalam bentuk visualisasi berupa lukisan pada dinding.



Ibu Elsita mempresentasikan ikhtisar
Proyek Governance mewakili desa uji coba



Bapak Esra yang mempresentasikan mimpi enam (6) desa uji coba untuk Gumas yang lebih baik.

B. Perwakilan SKPD

Presenter: Pitra Asi, ST, Dinas Pertambangan



Presentasi ikhtisar Proyek Governance dari Perwakilan SKPD oleh Ibu Pitra Asi

Proyek ini telah membantu peningkatan kapasitas lebih dari 100 staf pemerintah melalui pendampingan teknis, dan melakukan kunjungan belajar ke daerah lain.

Dua temuan kunci dari proyek ini seperti: 1) Selain adanya transfer pengetahuan dan keahlian dalam perencanaan dan penganggaran daerah; dan 2) Sejumlah staf SKPD juga mendapatkan keahlian sebagai fasilitator seperti Dinas Kesehatan dan Bappeda. Hal lain yang juga penting adalah kegiatan monitoring dan evaluasi proyek yang partisipatif. Hal ini merupakan pengalaman baru dengan menggunakan metode yang komprehensif mulai dari observasi, wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Kegiatan diakhiri dengan refleksi dalam tim yang melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui bagaimana hal itu berpengaruh pada mereka.

Proyek ini juga berkontribusi pada perbaikan kebijakan seperti: Revitalisasi kebijakan alokasi dana desa atau ADD dengan memfasilitasi kunjungan kerja BPMPDP-KB dan Bappeda ke Kabupaten Tuban. Setelah kunjungan tersebut, diadakan Lokakarya Revitalisasi ADD dengan fokus pada pemisahan distribusi anggaran untuk ADD dan Dana Perbantuan Insentif Pemerintahan Desa. Kebijakan baru ini memudahkan proses pengawasan dan tata laksana ADD. Faktanya, kebijakan ini mendorong Pemerintah Desa lebih transparan dan akuntabel. Proyek ini juga berkontribusi untuk mendukung Bappeda merancang kebijakan Pagu Indikatif kecamatan pada tahun 2013 dan 2014. Namun hal ini belum berhasil karena adanya prioritas proyek multi years yang harus diselesaikan bupati pada tahun 2013.

Rekomendasi untuk penguatan kapasitas SKPD; 1) Topik pelatihan lebih komprehensif mulai dari konsep good governance sampai dengan aspek-aspek teknis untuk keahlian perencanaan dan penganggaran daerah; 2) Penguatan kapasitas diperluas sampai pada pelaporan kinerja tahunan (LAKIP-AKIP); 3) Durasi pelatihan dari 2 hari menjadi 3 hari dan materi untuk peserta ada hard copy selain soft copy.

Rekomendasi untuk Pendampingan Musrenbang Kecamatan: Pendampingan untuk persiapan musrenbang kecamatan durasinya lebih lama dan tidak mepet dengan pelaksanaan musrenbang.

Rekomendasi untuk Pimpinan SKPD: direkomendasikan para pimpinan SKPD mengupayakan jumlah keterlibatan staff perempuan yang lebih banyak dalam berbagai kegiatan penguatan kapasitas bisa ditingkatkan jumlahnya di tahun mendatang. Pada proyek ini di tahun pertama rata-rata partisipasi staf perempuan sebanyak 5% dan pada tahun kedua sebanyak 10%-20%.



Perwakilan Desa menyerahkan mural mimpi 6 desa pada ASDA II untuk disampaikan pada Wakil Bupati Gumas di akhir presentasi dan umpan balik dari peserta.

C. Umpan balik peserta:

Gantian pasti, Bappeda:

Dukungan proyek ini sangat membantu peningkatan kualitas proses Forum Gabungan SKPD dan pendampingan musrenbang di Desa dan Kecamatan. Ke depan dukungan ini masih diperlukan.

Meskipun proyek ini sudah memberikan penguatan kapasitas dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD, namun ke depan masih perlu didampingi untuk memastikan pengetahuan yang sudah diterima oleh staf SKPD bisa diimplementasikan dengan benar.

Dukungan dan kerjasama antara YTS dan SKPD perlu dimasukkan kedalam Daftar Prioritas Anggaran SKPD (DPA SKPD).

Herianto, BPMPDP-KB

Pemerintah Kabupaten, khususnya BPMPDP-KB merasa terbantu dalam memfasilitasi RPJMDes/APBDes di Kahayan.

Tanggal 11-13 April 2012, praktek yang dilakukan oleh Kabupaten Tuban menarik untuk di adopsi terutama untuk perencanaan & pembangunan 3 pilar pembangunan yang sinergi. Peran swasta telah diatur untuk memberikan tanggung jawab sosial dalam pembangunan.

Ada sekitar 107 perusahaan tambang di Kabupaten Gunung Mas, selain menjadi investor juga diharapkan memberikan kontribusi untuk pemberdayaan masyarakat melalui CSR.

Pemerintah eksekutif dan legislatif harus aktif mendorong optimalisasi peran swasta dalam pembangunan.

Forum untuk CSR di Gunung Mas perlu digagas terutama bagi perusahaan dengan investasi lebih dari 20 miliar.

Tutut Mayda (Diskannak) menyampaikan kesan dan pesannya untuk Proyek Governance dalam puisi:

Hei Proyek Governance !

Ketika kamu datang, apa yang kamu tawarkan tidak ada yang baru... tapi kok terasa baru.

Ketika kita bekerja sama caranya biasa saja....tapi kok rasanya luar biasa.

Ketika kita akan berpisah....jangan pergi dulu ! Aku masih perlu !



Bapak Gantian Pasti dari Bappeda



Bapak Herianto dari BPMPPD-KB



Ibu Tutut Mayda dari Diskannak

D. Tanggapan dari Peserta



Bapak Enal, Camat Miri Manasa:

Minta didampingi lagi di Miri Manasa untuk 10 desa dan 9 kelurahan untuk pengembangan perkebunan tidak hanya karet tapi juga gaharu.



Bapak Malgori, Kepala Bappeda:

Ada semangat dari masyarakat pada saat ini untuk mengubah mata pencaharian mereka dari "budaya instant" menjadi "ekonomi kreatif". Proses ini akan membawa perubahan. Hal ini jika dilepas tanpa pendamping akan hilang, maka harus didampingi agar maksimal. Dalam hal ini YTS masih diperlukan.



Bapak Suprpto, BMPDP-KB:

Dia berterima kasih atas komitmen dan dedikasi YTS untuk meningkatkan kapasitas tiga kecamatan dan kesejahteraan masyarakat di Kahayan. Presentasi dari enam desa percontohan mengesankan dan luar biasa. SKPD harus lebih memperhatikan dan mengakui apa yang diinginkan oleh desa, dan memimpin agar masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tersebut.

Dia juga sepakat bahwa untuk meningkatkan komitmen sektor swasta menuju Gunung Mas yang lebih baik diperlukan regulasi yang memadai, serta koordinasi aktif pemerintah.

YTS masih dibutuhkan sebagai mitra strategis pemerintah, serta dari desa-desa, untuk membuat impian kita menjadi kenyataan.



Bapak Waja, DINKES:

Tiga pilar "good governance" perlu di perjelas perannya dan kerjasama dengan YTS perlu dilakukan karena Pemerintah Gumas masih perlu penguatan kapasitas dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator dan fasilitator tiga pilar ini secara optimal.



Bapak Yosua, PT. KSK:

Dalam rangka memberikan kontribusi pada pembangunan Gumas, KSK harus bekerja bersama dengan program CSR yang lain karena KSK masih Explorasi.

KSK sejauh ini telah taat Pajak.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kontribusi KSK dilakukan melalui YTS.

KSK siap jika Pemerintah Kabupaten Gumas membuat regulasi CSR



Bapak Yansiterson, ASDA II:

Sangat menghargai hasil pendamping YTS sbb:

Desa dibantu oleh YTS dapat menggunakan aset mereka (potensi) untuk menyuarakan kepentingan mereka .

Adalah baik bahwa enam desa percontohan membuat visi mereka melalui visualisasi, bukannya dipaksa untuk membuat peta . Ini adalah pembelajaran bagi SKPD untuk tidak menjadi kaku tentang alat / instrumen dalam hal pengumpulan data / informasi / aspirasi dari masyarakat. Presentasi dari enam desa telah terbukti efektif dalam mendapatkan perhatian dari pihak lain. Presentasi dengan banyak visualisasi sangat komunikatif.

PIK adalah satu-satunya jalan bagi Musrenbang untuk berhasil.

PIK harus berjalan selama Musrenbang tahun depan.

YTS harus mengajarkan desa-desa untuk mengembangkan alat analisis sederhana untuk membuat daftar prioritas dalam Musrenbang.

Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai semua impian atau visi pembangunan , tidak dalam satu atau dua tahun.

Dia terkejut dan terkesan bahwa Project Governance telah memungkinkan lebih dari 100 staf pemerintah untuk menerima peningkatan kapasitas. Masalahnya tetap bahwa transfer staf yang menyebabkan inefisiensi dalam kegiatan pengembangan kapasitas.

Rekomendasi dari SKPD untuk menambah hari lagi untuk pelatihan baik .

Dia berterima kasih kepada desa-desa percontohan yang telah menunjukkan dedikasi dan kreativitas bagi kita semua.

Sesi III: Diskusi Kelompok

Kelompok I SKPD: Rosalia Kecamatan Kurun), Goalter Zoko (Distanbun), Ravani (BKD), Pitra Asi (Distanben), Tutut Mayda (Diskannak), Ramiasi (Diskannak)

Fasilitator: Gantian Pasti, Bappeda; **Presenter:** Ramiasi, Diskannak



Hasil Diskusi:

Kelompok 1 menerima semua isi laporan akhir proyek yang dibuat oleh YTS.

Rekomendasi untuk proyek ke depan:

1. Ada kantor perwakilan YTS di Kuala Kurun untuk memudahkan koordinasi untuk semua program YTS.
2. Kegiatan pelatihan diperbanyak untuk semua SKPD
3. Studi banding untuk semua mitra SKPD bukan hanya BPMDP-KB dan Bappeda seperti di Fase I.

Kelompok I mengakhiri presentasinya dengan pantun:

"Buah Nangka, Buah Kedondong. Proyeknya lanjutin doooooong..."

Kelompok II SKPD: Bernard, Candra Novan (Disperindagkop), Abrori (Disdik), Jonswello (BLH), Proditus Arif (Dinkes)

Fasilitator: Aprianto (Bappeda); **Presenter:** Bernat Setreanus (BLH)



Hasil Diskusi:

Laporan akhir Proyek Governance yang disusun oleh YTS tidak ada tambahan dan dirasakan sudah memberikan informasi yang cukup baik.

Aspek-aspek yang sudah terangkum di dalam laporan dengan baik sebagai berikut:

Kami merasa proyek ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dalam perencanaan & penganggaran, pengalaman di tempat lain yang diceritakan oleh nara sumber, studi banding yang dilakukan beberapa SKPD, peningkatan kompetensi dalam kerjasama antar SKPD, dan penyelesaian masalah/penyelesaian tugas di dalam tim di SKPD.

Rekomendasi untuk Proyek Governance ke depan:

1. Peningkatan pemahaman staf SKPD tentang prinsip-prinsip good governance.
2. Strategi penguatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan dan studi banding ke daerah yang sudah maju.
3. Pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan tata kelola yang baik di Gumas selain staf juga Pimpinan SKPD dan pimpinan daerah harus terlibat aktif.
4. Para pimpinan di Gumas baik eksekutif maupun legislatif mendorong good governance dengan: mengeluarkan kebijakan yang menjadi payung hukum disertai pelaksanaan punishment and reward bagi semua pihak yang menjalankan atau tidak menjalankan kebijakan tersebut.
5. Tantangan yang masih dihadapi dalam mempromosikan good governance ini adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat dan masih banyak pihak (unsur pemerintah, masyarakat dan swasta) yang tidak mau menjalankannya. Sehingga kerjasama dengan proyek ini masih dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kelompok III SKPD: Osner Sagala (BPMDDP-KB), Herianto (BPMPDP-KB), Wingo Tampunan (Dinkes), Ribka (Dinkes), Ricky Yolanda (Bappeda), Marcus Wiro (Bappeda)

Fasilitator dan Presenter: Ruby Haris (BPMPDP-KB)



Hasil diskusi:

Kelompok ini menerima laporan akhir Proyek Governance dengan koreksi dan tambahan informasi sebagai berikut:

Pada halaman 6, pada bagian perbaikan distribusi anggaran ke desa mohon ditambahkan informasi sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa (yang bersumber dari DAU dan Bagi Hasil Pajak atau dalam bentuk ADD)
2. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Dalam Hal Ini DPA Kecamatan dan tidak dibebankan pada APBDes.

Pada halaman 10, pada kategori proyek; Dinas Kesehatan: tensi meter dihilangkan dan diganti dengan pita LILA dan sarung timbangan.

Rekomendasi ke depan:

1. Dukungan peningkatan kapasitas aparatur dalam menjalankan good governance
2. Strategi yang dijalankan melanjutkan penguatan kapasitas dengan pelatihan dan pendampingan fokus di Bappeda dan SKPD yang berminat.
3. Perlunya dukungan pimpinan baik di eksekutif maupun di legislatif khususnya pada saat penganggaran dan penetapan prioritas anggaran.
4. Tantangan yang dihadapi APBD yang masih terbatas maka perlu peningkatan kapasitas untuk meningkatkan APBD murni dan perlunya mendorong optimalisasi program CSR dari pihak swasta.

Kelompok Desa Uji Coba: Elsita Lisnawati & Naik Muei (Tbg. Tajungan), Martinus & Saradin (Tbg. Koroi), Kristopel & Esra (Tbg. Sian), Ginto & Manto (Mangkuhung), Alfrid & Deni (Tbg. Posu), dan Ganil (Tbg. Mahuroi)

Fasilitator: Dino Mikha (YTS); **Presenter:** Esra (Desa Tumbang Sian)



Hasil diskusi:

A. Laporan akhir proyek Governance diterima dengan catatan:

1. Perlu ditambah informasi usulan yang disetujui pada Musrenbang 2013 untuk realisasi 2014
2. Proyek Dinas Pendidikan hasil musrenbang 2012 di 6 desa uji coba belum direalisasikan

B. Rekomendasi untuk tahun-tahun mendatang:

1. Peningkatan kapasitas aparat desa (pemdes) dan BPD
2. Adanya pagu indikatif kecamatan (PIK)
3. Adanya sinergi antara pihak kecamatan dan YTS dalam melaksanakan Musrenbang desa
4. Kemandirian desa dalam melaksanakan Musrenbang desa
5. Adanya daftar prioritas dari SKPD (Renja) untuk usulan di Musrenbang desa

C. Strategi yang digunakan:

1. Pelatihan aparat desa (YTS and BPMPDP-KB)
2. Pelatihan fasilitator musrenbang desa 1 minggu sebelum kegiatan
3. YTS dan Kecamatan melakukan kerjasama dan kesepakatan dalam penjadwalan musrenbang desa
4. Membuat usulan/proposal ke dinas terkait
5. Studi banding kedesa lain yang dapat dijadikan contoh.

D. Pihak-pihak yang terlibat diperluas dengan melibatkan pihak swasta seperti: PT. KAP, KSK, DPRD, Bumi Mas Permata Abadi, Caruss Indonesia, Domas Raya (lokasi tersebar di 6 desa uji coba)

E. Para pimpinan tinggi di Gunung Mas dan SKPD seharusnya menunjukkan komitmen dan dukungan yang lebih nyata untuk tata kelola desa yang lebih baik.

Kelompok Kepala SKPD dan Dunia Usaha: Waja J. Dulin (Dinkes), Suprpto (BPMPDP-KB), Margori Limin (Bappeda), Enal (Kec. Miri Manasa), Yosua (PT. KSK)

Fasilitator: Yansisterson (ASDA II); **Presenter:** Suprpto (Kepala BPMPDP-KB)



Hasil Diskusi:

1. Laporan diterima dengan catatan:

Perlu diinformasikan dalam laporan siapa yang menjadi mitra YTS dalam pelaksanaan proyek Good Governance selama bekerja di Kabupaten Gunung Mas diluar dukungan langsung dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2. Peran-peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan:

- Mendukung pencapaian Visi Misi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2018.
- Strategi untuk keberhasilan pelaksanaan visi dan misi diatas adalah dengan mensinergikan 3 pilar "Good Governance" antara pihak pemerintah, sector swasta dan masyarakat.
- Peran pemerintah menerbitkan Grand Design pembangunan di Gunung Mas dan beberapa regulasi untuk mengatur setiap aspek dari "Grand Design" tersebut. Sedangkan peran pihak swasta dan warga masyarakat adalah terlibat aktif dalam agenda pembangunan dengan merujuk kepada "Grand Design" tersebut.
- Bupati, Wakil Bupati dan DPRD menerbitkan Peraturan daerah , Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati dan lain – lain.

3. Tantangan: Koordinasi lintas sector pembangunan masih lemah dalam beberapa aspek dan komitmen dari pengambil keputusan dengan instansi teknis (SKPD) harus konsisten dengan agenda pembangunan (seringkali berubah)

Presentasi:

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan media LCD maupun dibacakan.

Sesi IV: Penyerahan Penghargaan

Penyerahan Penghargaan

Kategori I: SKPD dengan praktek Good Governance

Diterima oleh: Dinas Kesehatan dan BPMPDP-KB



ASDA II menyerahkan penghargaan



Direktur YTS mengucapkan selamat

Kategori II: Aparatur Pemerintah dengan Kinerja Luar Biasa pada Proyek Governance

Diterima oleh: Enal (Camat Miri Manasa), Osner Sagala (BPMPDP-KB), Abrori (Dinas Pendidikan), Wingo Tampunan (Dinas Kesehatan), Naek Muie (Kepala Desa Tumbang Tajungan)



Direktur YTS dan ASDA II berfoto bersama penerima penghargaan

Kategori III: Partisipasi Terbaik pada Kegiatan Proyek Governance

Ricky Yulando (Bappeda), Marcus Wiro (Bappeda), Ramiasi (Diskannak), Tutut Mayda (Diskannak), Goalter Zoko (Distanbun), Hebron (Dinas PU), Pitra Asi (Distanben), Jonswello (BLH), Herianto (BPMPDP-KB), Ruby Haris (BPMPDP-KB), Martinie (Dinkes), Hesron (Dinkes), Anatin (Dinkes), Ribka (Dinkes), Heri Ikano (Dinkes), Proditus Arif (Dinkes), Nia (Dinkes), Desa Tumbang Koroi, Desa Mangkuhung, Desa Tumbang Sian, Desa Tumbang Tajungan, Desa Tumbang Posu, Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Miri Manasa.



Kepala Bappeda menyerahkan penghargaan untuk staf SKPD



ASDA II untuk kecamatan uji coba



Kepala BPMPDP-KB setelah menyerahkan penghargaan berfoto bersama perwakilan 6 desa uji coba dan Direktur YTS

Penerima penghargaan yang tidak hadir pada acara lokakarya ini adalah:

1. Kecamatan Damang Batu
2. Kecamatan Kahayan Hulu Utara
3. Stifen Panerus (Kategori III – Dinas Pendapatan Daerah)
4. Dodi Hartito (Kategori III – Dinas Pendidikan)

Sesi V: Penutupan

Ringkasan Sambutan Penutup

Bapak Bardolf Paul (Direktur YTS);

Beliau menyatakan senang dengan sambutan dan kerjasama yang baik dari Pemda Gumas. Beliau sepakat dengan Pak Yan bahwa PIK sangat penting untuk memastikan komitmen pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, semua pihak di desa maupun di kabupaten diharapkan tidak berhenti memperjuangkan kebijakan PIK sehingga bisa ada di Kabupaten Gumas di tahun mendatang.

Beliau juga menyampaikan bahwa Gumas beruntung memiliki PT. KSK sebagai salah satu stakeholder di Gumas, karena PT. KSK telah menunjukkan dedikasinya pada pembangunan di Gumas meskipun baru eksplorasi. Oleh sebab itu, Beliau mengajak semua pihak mendoakan kesuksesan PT. KSK. Jika KSK berjalan baik yang lain juga akan ikut baik.



Bapak Yansiterson (ASDA II)



Berterima kasih pada semua orang yang telah berprestasi dan mensukseskan proyek ini. Sesungguhnya proyek ini hanya sebuah media untuk menunjukkan bahwa banyak pihak memiliki komitmen untuk mewujudkan good governance di Gumas.

Beliau menghimbau agar masyarakat, pemerintah desa dan staf SKPD tidak terpengaruh dengan situasi politik di Gumas saat ini. Sekarang saatnya melepas atribut afiliasi politik dan mulai fokus memberikan yang terbaik untuk Gumas ke depan.

YTS masih diharapkan untuk tetap menjadi mitra terdepan YTS dalam penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah di Kabupaten Gunung Mas.

Kegiatan berakhir jam 12.30 WIB dan dilanjutkan dengan berfoto bersama dan makan siang.



Foto bersama diakhir acara

PENGUATAN KAPASITAS

Bekerja sama dengan pemerintah di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten untuk meningkatkan keterampilan dalam perencanaan dan penganggaran



ADVOKASI KEBIJAKAN

Menyediakan pedoman
tentang alokasi anggaran dan
sumber daya untuk menjawab
kebutuhan masyarakat
dan meningkatkan kinerja
pemerintah desa



KETERLIBATAN PUBLIK

Bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan sektor swasta untuk membawa manfaat bagi masyarakat desa



PEMBELAJARAN BERSAMA

Berbagi pengalaman tentang pembelajaran dan tantangan dengan semua pemangku kepentingan untuk mendorong perubahan dan pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola pemerintahan





Yayasan Tambuhak Sinta

Jl. Rajawali VII, Srikandi III, No. 100, Bukit Tunggul, Palangka Raya 73112
Kalimantan Tengah, Indonesia